

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K. M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Adji, O. S. (1996). *Prasarana dalam Indonesia Negara Hukum*. Jakarta: Simposium UI.
- Agun, W., Datin, L. K., Amlayasa, A., & Bagus, A. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 6(1).
- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Solus*, 18(3).
- Anka, R. D. (2022). Kesadaran Hukum Wajib Pajak dan Manfaatnya dalam Upaya Peningkatan Pembangunan. *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Arizona, Y. (2011). Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(3).
- Asshiddiqie, J. (2015). *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Astrina, S. D., Ruslan, A., & Aspan, Z. (2021). Asas Keadilan dalam Ketentuan Hukum Pajak Hotel Terhadap Rumah Kos. *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu Sosial, Hukum, dan Pengajarannya*, 16(2).
- Azizah, S. N., & Maulana, L. P. (2023). Pengaruh Kemajuan Pembangunan Negara dalam Defisit APBN pada Tahun 2022. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1).
- Barata, A. A. (2003). *Meminimalisasi dan Menghindari Sengketa Pajak & Bea Cukai*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Bayu, K. (2019). Direktorat Jenderal Pajak Sebagai Penegak Hukum Transformatif di Indonesia: (Urgensi Penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan). *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 1(1).
- Bisariyadi (2016). Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dan Negara Regulasi (*Regulatory State*) dalam Perkara Konstitusional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 4(23).
- Burhan, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Burnama, I. (2022). Aspek Keadilan Aturan Pajak Indonesia dalam Mengatur Transaksi Ekonomi Digital: Respon atas Investigasi USTR. *Jurnal Scientax*, 4(2).
- Cahyono, B. (2021). Asas Pemungutan Pajak dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 2(2).
- Calvin, S., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 10(1).
- Christian, F., & Aribowo, I. (2021). Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2).
- Dewa, M. J., Sinapoy, M. S., Haris, O. K., Tatawu, G., & Arifin, L. (2023). Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat. *Haluoleo Legal Research*, 5(1).
- Dian, A. T. (2016). Keterpatuhan Prinsip Keadilan dalam UU Pengampunan Pajak. *Jurnal Rechtsvinding*, 5(2).
- Elviandri, D. K., & Absori. (2019). Quo Yadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(2).
- Emilda, Y., & Erwin, S. (2020). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. *Palar: Pakuan Lawa Review*, 2(2).
- Ernawati, H., & Rifki, M. (2021). Konstitusionalitas Perubahan Postur APBN Melalui Perpu. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 1(2).
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 1(1).
- Hafiz, A. (2016). Dampak Izin Pertambangan Batu Bara bagi Lingkungan Masyarakat Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(4).
- Hamzani, A. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. *Jurnal Yustisia*, 3(3).
- Hanifahsari, D., & Setiadi (2023). Pengaruh Insentif Pajak dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Madya Bekasi. *JIMA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 3(2).
- Hartati (2012). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. *Jurnal MMH*, 41(4).

- Hartati, N. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: CV. Pustaka Setia.
- Haryadi, D. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan*. Bangka Belitung: UBB Press.
- Haskar, E. (2022). Faktor-Faktor Ketidapatuhan Wajib Pajak dalam Kewajiban Membayar Pajak. *Ensiklopedia Sosial Review*, 4(2).
- Herman, H., Haris, O., Hidayat, S., Rasmuddin, & Adi, A. (2023). Analisis Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Haluoleo Legal Research*, 5(2).
- Ilmar, A. (2012). *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Iqbal, M. (2017). Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Warta*, 51.
- Ishaq. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iskandar, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak di Indonesia. *Jurnal Keadilan Progresif*, 11(2).
- Jimmy, N. K. & Merang, R. (2020). Dampak Pertambangan Batu Bara dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2).
- Juwono, H. (2006). Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Masalah dan Fundamental bagi Solusi di Indonesia. *Jurnal Jakarta: Varia Peradilan*, 244.
- Kariyoto (2012). Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Perpajakan (Studi Pada Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur III). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(1).
- Kesuma (2016). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *Inovasi: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, 12(2).
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud, M. D. (2011). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.

- Malian, S. (2019). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Mardiasmo (2009). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Muljono.
- Marilang (2012). Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara atas Tambang. *Jurnal Konstitusi*, 9(2).
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Persada.
- Meliandar, N. M. & Utomo, R. (2022). Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(25).
- Merliyana, S. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Rawamangun Jakarta Timur). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 13(1).
- Mudzakkir (2011). Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan Hubungannya dengan Hukum Pidana Umum dan Khusus. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1).
- Mulyawan, W. & Alia, W. (2020). APBN dan Pendapatan Nasional. *Islamic Economics Journal*, 1(2).
- Munawarah (2023). *Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan: Realisasi Pajak Kalimantan Selatan di 2023 sudah 894 Miliar*. kassel.bpk.go.id. <https://kassel.bpk.go.id/-Realisasi-Pajak-Kalimantan-Selatan-di-2023-Sudah-894-Miliar>
- Munawwir, A. F., & Adib, B. (2008). *Kamus Al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mustamu, J. (2011). Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Sasi*, 17(2).
- Mustaqiem (2014). *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Nalle, V. I. (2012). Hak Menguasai Negara atas Mineral dan Batu Bara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba. *Jurnal Konstitusi*, 9(3).
- Notohamidjojo, O. (1970). *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Nugroho, T. S. (1991). *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: PT. Hanidita.

- Nur, Z. & Agus, S. (2022). Identifikasi Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2020. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2).
- Pardede, M. (2020). Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Bidang Perpajakan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3).
- Pertiwi, R., Devi, F., & Bondan, C. (2014). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo). *Jurnal Perpajakan*, 3(1).
- Pranata, I. (2023). Efektivitas Program Pengampunan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Data*, 3(2).
- Prantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia: Edisi Dua*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Puspitasari, C. (2005). Mendorong Tingkat Kepatuhan Pajak Melalui Penegakan Hukum Terhadap Aparat Pajak. *Jurnal Civics*, 2(2).
- Putra, P., Putu, W., & Sukaryati, K. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1).
- Putri, A. (2023). Peranan Hukum Pajak dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1).
- Rafiq, W., Putra, R., Faradisa, A., & Ferry, I. (2023). Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan. *Jurnalku*, 3(2).
- Rahayu, A. S. (2010). *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramli, Afzal, M., & Ardika, G. (2019). Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum. *Jurnal Hukum Media Keadilan*, 10(2).
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Ridwan H. R. (2014). *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rioni, Y. S., & Syauqi, T. R. (2022). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2).
- Rosdiana, H., Maria, T., & Inayati (2020). Penyempurnaan Hukum Formal Perpajakan Terkait Tata Cara Perpajakan. *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, 22(2).

- Rukmini, B. S. (2016). Peranan Pajak dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Dewantara*, 3(2).
- Rusnan (2014). Konsep Negara Hukum dalam Hubungan Kekuasaan Freiss Ermerssen dalam Welfare State. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(14).
- Samuel, R., Paranoan, D. B., & Djaja, S. (2013). Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman. *Journal Administrative Reform*, 1(3).
- Sanyoto (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3)
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung Rapika Aditama.
- Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 7(1).
- Soemarsono, M. (2007). Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2.
- Solihah, C. (2017). Implikasi dan Arah Kebijakan Pemberian Anggaran APBN/APBD untuk Operasional Pengelola Zakat dalam Meningkatkan Fungsi Pemerintah. *Jurnal Sawala*, 5(2).
- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1).
- Subri, M. (2003). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sudjana (2020). Penerapan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Kecil. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2).
- Syawal, M. (2016). Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala. *Jurnal Katalogis*, 4(4).
- Tjahyono, A. (2005). *Perpajakan: Edisi Ketiga*. Yogyakarta: YKPN.
- Ventiya, E. S., & Galuh, P. D. (2010). Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Perannya dalam Memperkuat Fungsi Budgetair Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, 1(1).
- Waluyo (2019). *Perpajakan Indonesia: Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.

- Wulandari, S. & Budiaji, A. (2017). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Islamiconomic*, 8(2).
- Yamin, M. (1982). *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zaini, A. (2015). Konsepsi Welfare State dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*, 11(1).
- Zulkarnain, R. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).